

Efek Limpahan Konflik Laut China Timur Terhadap Pengembangan dan Penatagelaran Kekuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III di Perairan Timur Indonesia

(The Spillover Effect of The East China Sea Conflict on The Development of Kogabwilhan III Power in The Eastern Waters of Indonesia)

Niko Oktorina, Amir Kasman, Rudy Sutanto
nikooktoriao@gmail.com, r.sutanto@idu.ac.id

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia, ²Sesko TNI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, strategi ideal, serta faktor penghambat dan pendukung dari upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) dalam menghadapi ancaman efek limpahan (*spillover effect*) dari konflik terbuka di Laut China Timur terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Timur Indonesia, khususnya di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Kajian ini menyimpulkan bahwa Kogabwilhan III telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pertahanan, menyesuaikan strategi, dan memperkuat kerja sama multilateral. Strategi ideal yang diterapkan Kogabwilhan III mencakup pendekatan *grand strategy*, *teori deterrence*, integrasi ilmu pertahanan, serta pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society*. Faktor penghambat yang dihadapi Kogabwilhan III antara lain luas dan kompleksitas wilayah, kekurangan alutsista maritim, keterbatasan personel, aktivitas ilegal, dan keterbatasan anggaran. Sementara faktor pendukung meliputi peningkatan perhatian pemerintah, peluang kerja sama internasional, transfer teknologi dan alutsista, serta peningkatan kualitas personel. Rekomendasi yang diajukan antara lain meningkatkan koordinasi, modernisasi teknologi, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerja sama diplomatik dan pertahanan, serta alokasi anggaran yang memadai.

Kata kunci: Efek Limpahan, Kogabwilhan III, Konflik Laut China Timur, Penatagelaran Kekuatan

Abstract. *This study aims to analyze the implementation, ideal strategies, as well as inhibiting and supporting factors of the efforts of the Joint Command of the Defense Region III (Kogabwilhan III) in facing the threat of spillover effects from open conflicts in the East China Sea against Indonesia's sovereignty in the waters of Eastern Indonesia, especially around the Sea Channel of the Indonesia Archipelago III (ALKI III). The research method used is qualitative descriptive, with data collection through interviews and literature studies. This study concludes that Kogabwilhan III has made various efforts, such as increasing vigilance, strengthening defense, adjusting strategies, and strengthening multilateral cooperation. The ideal strategy implemented by Kogabwilhan III includes a grand strategy approach, deterrence theory, integration of defense science, as well as a whole-of-government and whole-of-society approach. The inhibiting factors faced by Kogabwilhan III include the breadth and complexity of the area, the shortage of maritime defense equipment, the limitation of personnel, illegal activities, and budget limitations. Meanwhile, supporting factors include increased government attention, opportunities for international cooperation, technology transfer and defense equipment, and improvement in the quality of personnel. The recommendations submitted include improving coordination, modernizing technology, developing an early warning system, increasing human resource capacity, strengthening diplomatic and defense cooperation, and adequate budget allocation.*

Keywords: *Deployment of Power, East China Sea Conflict, Kogabwilhan III, Spillover Effect.*

1. Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok secara agresif berupaya untuk memperkuat hegemoninya di kawasan Asia terutama untuk menguasai Laut China Selatan. Dinamika yang terjadi di kawasan Laut China Timur dalam beberapa tahun terakhir membawa kekhawatiran terjadinya peningkatan eskalasi situasi yang membawa pada kemungkinan pecah perang terbuka antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dinamika tersebut bersumber pada adanya konflik kepentingan terhadap stabilitas keamanan kawasan yang menyangkut status Taiwan dan agresivitas Korea Utara. Kedua kekuatan besar tersebut memandang satu sama lain sebagai kekuatan yang mengganggu hegemoni masing-masing di kawasan tersebut. Amerika Serikat selepas berakhirnya masa perang dingin dengan blok Timur berhaluan komunis, yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet pada 1990, menjadi satu-satunya negara besar yang menancapkan hegemoninya di dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Tiongkok merupakan negara besar yang mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat di dua dekade terakhir ini dan sedang berupaya untuk menggugat hegemoni Amerika Serikat di dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Adanya konflik kepentingan yang tajam di antara kedua negara terkait dengan status Taiwan sebagai sebuah negara menjadi tolak ukur keamanan kawasan di Laut China Timur. Taiwan hingga saat ini tidak diakui sebagai negara merdeka oleh Tiongkok melainkan hanya sebagai salah satu provinsinya yang memisahkan diri dari Tiongkok. Pada pidato nasionalnya menyambut tahun baru 2024, Presiden Tiongkok, Xi Jin Ping, menyatakan ketegasannya untuk melaksanakan reunifikasi Tiongkok dan Taiwan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan secara sejarah (*historical inevitability*), (Reuters, 2024). Di sisi lain, Amerika Serikat walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Taiwan sebagai sebuah negara yang Merdeka (O'Dell, 2023), namun tetap berkomitmen untuk membela Taiwan jika negara pulau tersebut diserang secara militer oleh Tiongkok (Steve Holland, 2024).

Eskalasi ketegangan yang meningkat, apalagi sampai terjadi konflik terbuka, akan membawa dampak negatif bagi kawasan, termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap Taiwan. Meskipun isu Taiwan bagi China merupakan masalah internal, negara-negara kawasan, termasuk Indonesia bersama ASEAN, dan juga melalui diplomasi parlemen, harus mengingatkan dan mendesak semua pihak, terutama China dan AS, untuk bisa menahan diri dan menjauhi provokasi, serta menghormati piagam PBB dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, yang sangat menjunjung tinggi pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global, (Muhamad, 2022). Selain tingginya intensitas Tiongkok dengan Amerika Serikat, ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan juga kembali meningkat. Hal ini dipicu oleh sikap agresif Korea Utara yang menilai semakin meninggalkan upaya reunifikasi dengan Korea Selatan. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan yang diambil oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dengan mengubah konstitusi Korea Utara yang berisi upaya reunifikasi serta menghapus badan pemerintah urusan reunifikasi dan kerjasama ekonomi (VOA, 2024). Sikap agresif ditunjukkan Korea Utara sebagai respon diselenggarakannya latihan bersama Korea Selatan dengan AS dan Jepang yang dianggap sebagai provokasi.

Australia sebagai negara tetangga di Selatan Indonesia tengah berupaya untuk mengembangkan kekuatan maritimnya. Langkah tersebut dapat dilihat pada tahun 2022, AS, Inggris dan Australia telah membentuk aliansi baru bernama AUKUS (*Australia-the United Kingdom-the United States*) dengan menekankan pada prosedur penggunaan persenjataan yang kompatibel dan interoperable antara ketiga negara tersebut, termasuk kapal selam nuklir. Hal ini

menandakan bahwa pihak AS dan sekutunya, Australia, bersama dengan Jepang dan Korea Selatan menganggap eskalasi yang terjadi di Taiwan dan Korea Utara perlu mendapatkan perhatian ekstra serta perlu mengambil langkah antisipasi terhadap agresivitas Tiongkok dan Korea Utara, yang jika dilihat dari sudut pandang Tiongkok dan Korea Utara, sebagai aksi provokatif AS dan sekutunya di kawasan tersebut. Dari beberapa perkembangan peristiwa lingkungan strategis yang telah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa situasi keamanan di kawasan Laut China Timur sangat rentan terhadap eskalasi menuju pada perang terbuka. Meskipun beberapa pengamat menyaksikan perang akan segera terjadi (Roy, 2024).

Namun kemungkinan tersebut masih terbuka dan mungkin (*likely*) untuk terjadi. Pada saat ini, pihak AS dan sekutunya di satu sisi serta pihak Tiongkok dan mitranya Korea Utara Di sisi yang lain memiliki rasa saling mencurigai satu sama lain atas sikap agresif masing-masing pihak. Kecurigaan ini menimbulkan situasi ketidakpastian (*uncertainty*) di antara negara-negara di kawasan, khususnya di Indonesia.

Keberadaan Indonesia sendiri, seperti telah diketahui bersama, sangat rentan menerima efek tumpahan (*spillover effect*) jika eskalasi situasi terjadi hingga tahap konflik terbuka bersenjata terjadi antar pihak yang bertikai. Secara geografis, letak Indonesia akan menjadi jalur komunikasi bagi kekuatan maritim kedua belah pihak, baik AS dan sekutunya (terutama Australia) maupun Tiongkok. Kekuatan laut dan udara Australia serta AS sering menggunakan ALKI II dan III sebagai jalur untuk menuju daerah operasi di Laut China Timur dan/atau kembali ke pangkalannya.

Melihat kemungkinan akan terjadinya konflik terbuka di Laut China Timur serta efek limpahan (*spillover effect*) dari konflik tersebut yang tentunya akan mempengaruhi tegaknya kedaulatan Indonesia sebagai negara netral. Dengan demikian, maka terdapat potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah perairan sekitar ALKI III yang berada tepat di Selatan dari Laut China Timur. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini akan membahas ancaman efek limpahan (*spillover effect*) bagi kedaulatan Indonesia di wilayah laut dan udara yang mungkin terjadi jika terjadi konflik bersenjata di wilayah Laut China Timur. Keadaan yang ideal terkait keamanan maritim di perairan timur Indonesia diharapkan menjadi Kawasan yang stabil dan bebas konflik sehingga pelayaran dan perdagangan dapat terjamin namun kenyataan di lapangan masih adanya aktivitas militer yang meningkat akibat konflik laut China Timur yang berpotensi meluas.

Hasil yang diharapkan yaitu adanya optimalisasi pengembangan dan penataan gelar kekuatan Kogabwilhan III baik itu meningkatkan jumlah pasukan, alutsista, penambahan kedua jenis radar yang belum dimiliki wilayah timur Indonesia, dan aspek-aspek pendukung lainnya. Sehingga dapat mendorong Kogabwilhan III untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di wilayahnya dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai kekuatan penangkal ancaman dari luar.

2. Tinjauan Pustaka

Pertahanan adalah seni untuk tetap hidup, baik oleh pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukannya atau oleh pihak yang hanya mengharapkan rasa aman dan damai, (Tippe, 2016). Negara harus menjamin keamanan nasional untuk mencapai rasa aman dan bebas dari rasa takut atau terancam, yang merupakan dasar dari kebutuhan perlindungan negara (Sheehan, 2005). Pertahanan negara dilakukan untuk melindungi setiap warga negara dan kepentingan negara. Untuk menilai seberapa penting perlindungan bagi keutuhan dan keamanan suatu negara, teori ilmu perlindungan tersebut digunakan. Menurut Yusgiantoro (2019), Ancaman merupakan elemen kunci dalam konsep penangkalan atau deterrence, yang dapat berwujud dalam bentuk aktual (nyata) maupun potensial (belum terwujud). Konsep ancaman dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dianggap

membahayakan integritas wilayah NKRI. Lebih lanjut, ancaman juga mencakup hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan bangsa atau bertindak sebagai penghalang yang membahayakan pencapaian kepentingan nasional. Dengan demikian, pemahaman tentang ancaman menjadi sangat penting dalam konteks keamanan dan pertahanan nasional, karena mencakup berbagai aspek yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Menurut Lemhanas (2013) ancaman militer dan ancaman non-militer adalah dua jenis ancaman. Ancaman militer terjadi ketika lawan menggunakan rencana teknologi dan taktis militeristik.

Harry R. Yager menggambarkan proses strategi sebagai ide tentang bagaimana pemimpin negara akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan berbagai situasi dan lokasi geografis dengan cara yang sesuai dengan kebijakan negara, (Yager H R, 2006). Namun, menurut Collin S. Gray, strategi bagi negara tidak mudah atau mudah. Banyak profesional militer diperlukan untuk merumuskan, mengungkapkan, meluncurkan, dan melaksanakan strategi yang efektif. Sebagian kecil melakukannya dengan baik, (Gray C S, 2014). Sebagai konsekuensinya, sebuah strategi yang efektif perlu mengintegrasikan tiga elemen kunci secara komprehensif. Pertama, strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur sebagai arah utama yang ingin dicapai. Kedua, strategi tersebut harus menjabarkan metode atau pendekatan spesifik yang akan diterapkan dalam proses pencapaian tujuan. Ketiga, strategi harus mengidentifikasi dan mengalokasikan sarana atau sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan metode yang telah dipilih. Dengan memadukan ketiga aspek ini - tujuan, metode, dan sarana - suatu strategi dapat menyediakan kerangka kerja yang koheren dan komprehensif, memungkinkan pelaksanaan yang terarah dan efisien dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, (Prinhantoro K dan Prakoso L Y, 2021)

Faktor penghambat dan pendukung (*force field analysis*), Menurut Lewin (1947), yang dikutip dari (Cummings & Worley, 2016) menyatakan bahwa setiap situasi ditentukan oleh kekuatan yang saling bertentangan yaitu kekuatan pendorong (pendukung) yang memajukan perubahan dan kekuatan penahan (penghambat) yang menahan perubahan. Kekuatan pendorong adalah faktor-faktor yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya perubahan dan bertindak untuk mendorong perubahan dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Sedangkan kekuatan penahan adalah faktor-faktor yang menghambat atau menentang terjadinya perubahan.

Menurut Edward III, dalam (Subarsono, 2015) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, komunikasi yang efektif sangat penting. Para pelaksana harus memahami dengan jelas tindakan yang perlu diambil, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Informasi ini harus disampaikan dengan tepat kepada kelompok sasaran. Jika terjadi ketidakjelasan atau ketidakteraturan dalam penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan, hal ini dapat memicu penolakan dari pihak yang menjadi target kebijakan.

Diperkenalkan oleh Laksamana Muda Alfred Thayer Mahan (1840-1914) dalam bukunya "*The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783*". Mahan mengidentifikasi enam elemen fundamental yang menjadi landasan bagi pembangunan kekuatan laut yang tangguh, yaitu: posisi geografis, konformasi fisik, luas wilayah, karakter penduduk, jumlah populasi, dan karakter pemerintahan. Elemen-elemen ini dipandang sebagai modal utama dalam membangun dan mempertahankan dominasi maritim suatu negara. *Sea power* dapat diinterpretasikan sebagai kapasitas suatu Negara yang memiliki angkatan laut dengan kemampuan yang sangat mumpuni.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur/dokumen. Menurut John W. Cresswell (2017), teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan untuk menghimpun informasi yang relevan dalam sebuah penelitian, melibatkan penggunaan alat, instrumen, dan prosedur yang

bertujuan untuk mengumpulkan data secara objektif dan sistematis (Cresswell, 2017). Teknik ini mencakup berbagai cara untuk mengumpulkan data, termasuk melalui survei, wawancara, dan metode lainnya, yang semuanya bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan akurat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Secara umum, teknik pengumpulan data adalah langkah yang dirancang untuk mendapatkan informasi melalui metode tertentu, yang sangat penting demi menjamin keakuratan data yang diperoleh.

Konsep "*sea power*" pertama kali

4. Hasil dan Pembahasan

Kogabwilhan III telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi ancaman ini. Namun, upaya yang dilakukan perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Sebagai negara kepulauan, pertahanan merupakan aspek terpenting, khususnya pertahanan laut. Jika negara tidak mampu mengembangkan pertahanan yang kuat dan terpercaya terhadap segala ancaman, baik internal maupun eksternal, maka negara tersebut tidak akan dapat bertahan (Indrawan, 2015).

Kogabwilhan III telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dalam menghadapi ancaman *spillover* dari konflik Laut China Timur. Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti melakukan patroli maritim, kerjasama dengan negara tetangga, dan sebagainya. Strategi yang diterapkan mencakup aspek militer, diplomatik, dan ekonomi. Namun, mengingat kompleksitas situasi dan dinamika geopolitik yang terus berubah, diperlukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan. Kerjasama regional dan peningkatan kapabilitas pertahanan tetap menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Timur Indonesia.

Strategi Ideal dalam Mengembangkan dan Menata Gelar Kekuatan Kogabwilhan III. Untuk menjaga kedaulatan Indonesia Khususnya di wilayah Timur Indonesia, Kogabwilhan III menerapkan berbagai strategi dan pendekatan. Ini mencakup penyesuaian strategi pengembangan dan penataan gelar kekuatan di wilayah perairan timur Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kemampuan maritim, penguatan kewaspadaan, dan pengembangan intelijen maritim. Kogabwilhan III juga aktif terlibat dalam kerjasama multilateral, termasuk partisipasi dalam latihan bersama dan forum-forum keamanan regional. Selain itu, penempatan strategis aset angkatan laut dan udara di titik titik kunci sepanjang ALKI III dan penguatan basis-basis militer di pulau-pulau strategis menjadi bagian integral dari strategi ini.

Lebih lanjut, strategi *deterrence* Kogabwilhan III juga melibatkan elemen komunikasi strategis. Latihan militer berskala besar yang dilakukan secara rutin, seperti latihan gabungan antar matra atau latihan bersama dengan negara-negara sekutu, berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan yang efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi strategi *deterrence* oleh Kogabwilhan III dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi ketegangan yang tidak perlu. Hal ini menekankan pentingnya menyeimbangkan proyeksi kekuatan dengan upaya diplomatik untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, strategi *deterrence* yang diterapkan oleh Kogabwilhan III merupakan pendekatan multi-dimensi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melibatkan elemen-elemen *soft power*, diplomasi, dan kerja sama regional.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari ketiga teori tersebut, strategi Kogabwilhan III mendemonstrasikan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan keamanan regional yang kompleks. Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-militer seperti diplomasi, kerja sama internasional, dan ketahanan masyarakat, yang merupakan ciri khas dari pendekatan pertahanan modern yang komprehensif. Dalam konteks teori Ilmu Pertahanan, strategi Kogabwilhan III juga mencerminkan konsep pertahanan aktif (*active defense*) yang menekankan pentingnya

kemampuan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara proaktif. Penguatan kemampuan pengawasan, deteksi dini, dan respons cepat di wilayah ALKI III menunjukkan implementasi konsep ini. Selain itu, pendekatan yang melibatkan masyarakat pesisir dalam sistem pertahanan mencerminkan konsep pertahanan semesta (*total defense*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam doktrin pertahanan Indonesia.

Faktor Penghambat dan Pendukung Dari Upaya Yang Telah Dilakukan Kogabwilhan III. Konflik di Laut China Timur memicu kekhawatiran terkait efek limpahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah perairan Timur Indonesia, terutama di ALKI III. Kogabwilhan III bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah ini, namun menghadapi berbagai tantangan. Menurut Lewin (1947), yang dikutip dari (Cummings & Worley, 2016), faktor penghambat dan pendukung (*force field analysis*) menyatakan bahwa setiap situasi ditentukan oleh kekuatan yang saling bertentangan, yakni kekuatan pendorong (pendukung) yang memajukan perubahan dan kekuatan penahan (penghambat) yang menahan perubahan. Keseimbangan antara kedua kekuatan ini menentukan apakah suatu perubahan akan berhasil atau gagal.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Timur, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kogabwilhan III, diantaranya adalah:

- a. Wilayah perairan Timur Indonesia yang luas dan terdiri dari berbagai zona maritim seperti ZEE dan landas kontinen, membuat pengawasan dan patroli menjadi sangat menantang. Hambatan ini sangat kritis karena luasnya wilayah yang harus diawasi dapat menguras sumber daya yang ada, baik itu waktu, tenaga, maupun peralatan.
- b. Keterbatasan Alutsista Maritim di Kogabwilhan III, terutama dalam hal kapal perang, pesawat patroli, dan sistem persenjataan canggih, menjadi hambatan utama yang sangat signifikan dalam menjaga keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Timur. Wilayah ini memiliki posisi strategis, terutama di jalur-jalur penting seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, yang merupakan rute utama bagi lalu lintas maritim internasional. ALKI III tidak hanya menjadi jalur vital bagi perdagangan global, tetapi juga merupakan koridor yang sering dilalui oleh kekuatan militer asing, baik dari negara-negara tetangga maupun kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengamankan jalur ini secara efektif dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional. Kekurangan kapal perang yang memadai berarti Kogabwilhan III tidak dapat menggelar patroli maritim secara konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah tanggung jawabnya.
- c. Keterbatasan Personel terlatih di Kogabwilhan III menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, terutama di wilayah perairan Timur Indonesia yang luas dan strategis. Personel terlatih adalah komponen kunci dalam operasional militer yang efektif, terutama dalam konteks maritim, di mana situasi dapat berubah dengan cepat dan membutuhkan respons -ancaman ini, personel yang terlatih dengan baik adalah aset yang tak tergantikan. Keterbatasan dalam jumlah personel terlatih berarti bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan wilayah yang luas harus dibebankan pada sumber daya manusia yang ada, yang dapat menyebabkan penurunan efektivitas operasional
- d. Potensi Insiden Maritim Konflik yang berlangsung di Laut China Timur menimbulkan eskalasi risiko yang signifikan, khususnya terkait dengan insiden maritim, pelanggaran wilayah, dan kemungkinan miscalculasi yang dapat

mengancam stabilitas regional secara keseluruhan. Wilayah ini telah menjadi kekuatan besar, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan implikasi yang jauh melampaui batas-batas nasional mereka. Ketegangan yang terus meningkat di wilayah ini memiliki potensi untuk memicu dampak negatif yang luas, baik secara langsung maupun melalui spillover effect ke negara negara tetangga, termasuk Indonesia. Risiko insiden maritim menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas militer di Laut China Timur.

- e. Aktivitas Ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*), penyelundupan, dan perompakan yang masih marak terjadi di wilayah perairan Timur Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Wilayah ini, yang memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam, sering menjadi target aktivitas kriminal yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan di kawasan yang strategis ini. Penyelundupan juga menjadi masalah yang tak kalah serius. Wilayah perairan Timur Indonesia sering dijadikan jalur transit bagi penyelundup yang mengangkut berbagai barang ilegal, mulai dari narkoba, senjata, hingga barang-barang konsumsi yang tidak dikenakan pajak
- f. Keterbatasan Anggaran pertahanan merupakan hambatan kritis yang berdampak langsung pada kemampuan Kogabwilhan III untuk melaksanakan tugas-tugas operasionalnya secara efektif. Dengan anggaran yang terbatas, pengadaan alutsista modern dan canggih, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia, menjadi terhambat. Akibatnya, Kogabwilhan III harus bekerja dengan sumber daya yang kurang memadai, baik dari segi peralatan maupun infrastruktur, yang secara signifikan membatasi efektivitas keseluruhan operasi militer di wilayah perairan Timur Indonesia. Pengadaan alutsista, seperti kapal perang, pesawat patroli maritim, dan sistem persenjataan canggih, membutuhkan investasi yang sangat besar. Namun, dengan anggaran yang terbatas, prioritas pengeluaran sering kali harus difokuskan pada kebutuhan mendesak atau operasional yang lebih mendasar, sementara pengembangan dan modernisasi alutsista harus ditunda atau bahkan diabaikan.

Meskipun terdapat banyak hambatan, terdapat faktor pendukung yang muncul dan dapat memperkuat Kogabwilhan III, diantaranya:

- a. Konflik yang terus berkembang di Laut China Timur memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam hal keamanan maritim. Ketegangan di wilayah tersebut, yang melibatkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, menciptakan ancaman nyata bagi stabilitas kawasan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Ancaman ini berfungsi sebagai pemicu bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan keamanan maritim, terutama di wilayah perairan Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan jalur-jalur strategis dan sering dilintasi oleh kapal-kapal militer asing. Peningkatan perhatian pemerintah terhadap keamanan maritim dapat berujung pada perubahan signifikan dalam alokasi anggaran pertahanan. Ketika risiko konflik di Laut China Timur semakin nyata, pemerintah Indonesia mungkin melihat perlunya memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di perairan yang vital ini.
- b. Kerjasama internasional dengan negara lain menawarkan peluang strategis yang signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat Kogabwilhan III

melalui transfer teknologi dan pengadaan alutsista maritim yang lebih canggih. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, terutama dengan meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Timur dan sekitarnya, memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan negara-negara lain dapat menjadi jalur yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan teknologi yang saat ini dihadapi penting dari kerjasama internasional yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia. Melalui program transfer teknologi, Indonesia dapat mengakses teknologi militer mutakhir yang sebelumnya tidak tersedia di dalam negeri. Dengan mengadopsi teknologi ini, Kogabwilhan III dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya secara signifikan, memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman, peningkatan kemampuan responsif terhadap insiden maritim, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah perairan yang luas.

- c. Dengan adanya peningkatan anggaran yang lebih besar dan dukungan dari kerjasama internasional, pelatihan dan pendidikan personel dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya memungkinkan lebih banyak personel untuk mendapatkan akses ke program pelatihan yang lebih berkualitas dan berstandar internasional, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan ahli-ahli terkemuka dari berbagai negara. Dalam jangka panjang, investasi ini akan menghasilkan peningkatan kompetensi yang lebih merata di kalangan personel, serta memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lapangan. Selain itu, melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, profesionalisme personel akan meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Personel yang lebih terlatih dan profesional juga akan mampu menerapkan praktik terbaik dan inovasi terbaru yang diperoleh dari pengalaman internasional, sehingga memperkuat daya saing dan efektivitas operasional organisasi di tingkat global. Dengan demikian, anggaran yang lebih besar dan kerjasama internasional bukan hanya investasi dalam sumber daya manusia, tetapi juga investasi strategis yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi dalam konteks global yang terus berkembang

Dalam analisis menggunakan teori Kurt Lewin (1947), faktor penghambat memiliki kekuatan yang signifikan dan menghambat kemampuan Kogabwilhan III dalam menjaga kedaulatan Indonesia di perairan Timur. Namun, faktor pendukung menunjukkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Kogabwilhan III. Strategi yang efektif akan bergantung pada bagaimana Kogabwilhan III mampu menyeimbangkan dan memaksimalkan kekuatan pendukung sambil mengurangi atau mengatasi hambatan yang ada. Ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan mitra internasional.

5. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Kogabwilhan III dalam menghadapi ancaman *spillover* dari konflik Laut China Timur di wilayah perairan Timur Indonesia, khususnya di sekitar ALKI III, menunjukkan komitmen yang signifikan namun juga menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang dilakukan meliputi patroli maritim, kerjasama regional, dan peningkatan kapabilitas pertahanan melalui modernisasi alutsista, pengembangan sistem pengawasan, dan pelatihan personel. Strategi Kogabwilhan III mengintegrasikan aspek militer, diplomatik, dan ekonomi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Analisis menunjukkan bahwa Kogabwilhan III harus mampu menyeimbangkan dan memaksimalkan faktor pendukung sambil mengatasi hambatan yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, serta investasi dalam teknologi, personel, dan kerjasama internasional, Kogabwilhan III dapat memperkuat kemampuannya dalam menghadapi ancaman spillover dari konflik Laut China Timur dan menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan di wilayah perairan Timur Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdoellah, Oekan S., 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, S. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arhur, Lykke. 1993. *Military Strategy: Theory and Application*, Pennsylvania: US Army War College
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). *DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR)*.
- A. Irawan J. H dan Giandi Kartasasmita, 2015. *Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). *UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA*
- Bajari, Atwar. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren dan Etika* Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Cable, James., 1981. *Gunboat Diplomacy 1919-1979: Political Applications of Limited Naval Force*. St. Martin's Press, New York.
- Daniel Moran and James A. Russel. 2016. *Maritime Strategy and Global Order*, Washington DC: Georgetown University Press.
- Fishman, Ted C., 2005. *China Inc.: How the Rise of the next Superpower Challenges America and the World*. Simon & Schuster Publisher.
- Geoffrey Till. 2004. *Sea Power, A Guide for Twenty-First Century*, London: Frank Class Publisher.
- Hanifahturahmi, 2020. *Komunikasi Internasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan di Natuna Utara*, Jurnal Dinamika Pemerintahan. Vol. 3, No. 2.
- Hayton, B. 2014. *The South China Sea: the struggle for power in Asia*. Yale University Press.
- Jeffrey G. Lofgren, 2002. *21st Century Air Power Theorists: Who Has It Right John Warden or Robert Pape?*, National Defense University, National War College.
- Julian S. Corbett. 1911. *Some Principle of Maritime Strategy* (Longmans, Green and Co, London and New York).
- Kaplan, Robert D., 2014. *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House LLC, New York.

-
- Khanna, Parag., 2008. *The Second World: How Emerging Power are Redefining Global Cmpetition in the Twenty-First Century*. The Penguin Group, london, England.
- Lai, Benjamin. 2016. *The Dragon'teeht: the Chinese People's Liberation Army-Its History, Tradition, and Air, Sea and Land Capabilities in the 21st Century*: Casemate Publishers, Havertown USA and Oxford UK`
- Mahan, A.T., 1987. *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, New York: Dover Publications
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Source book*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Milan N. Vego, 2016. *Maritime Strategy and Sea Control: Theory and Practice*, London: Routledge.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Parker, R. D. 2003. *Mahan for the twenty first century: His principles still apply to national power*. Marine Corps Command And Staff College Quantico Va.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Reed, D. (Ed.). 2014. *In Pursuit of Prosperity: US Foreign Policy in an Era of Natural Resource Scarcity*. Routledge.
- Robert, C. Rubel, 2014. *Joint Strategic and Operational Planning Smart Book*, Lakeland: The Lightning Press.
- Santacroce, 2012. *Command of the Sea - An Old Concept Resurfaces in a New Form* Naval War College Review, Autumn.
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). *Definisi Dan Konsep. Manajemen Sumber Daya Manusia, 1*.
- Singh, Jodh., 1987. *Defence Studies: National and Civil Defence and Military Law*. Surjeet Publications, New Delhi.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Jakarta : Alfabeta

2. Jurnal

- Muhamad, S. V. (2022). *Konflik China-Taiwan Dan Implikasinya*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, N, 7–12.
- Fajri, M. B. (2020). *Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan*. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 59-78.
- Godfrey, Jack E. (1969) "Mahan: The Man, His Writings and Philosophy," *Naval War College Review*: Vol. 22 : No. 3 , Article 6. Hlm. 64
- Ginting, R. (2018). *Perilaku Militer China di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna (Periode 2016-2017)*.
- Pambudi, A. W. (2019). *Analisa Respon Indonesia Terhadap Aktivitas Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019*. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 89-104.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. *HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA*.

-
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). *POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS*. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Wahyudi, A. H. (2016). Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan [The Role and Strategy of Indonesia with ASEAN to Reduce Conflict in the South China Sea]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 8(16), 17-30.
- Murniningtyas, Endah (2016). Ringkasan Prakarsa Strategis: Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Jakarta: Bappenas), hlm. 1

3. Media Online

- Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2016). Organization development & change.
- Davenport, K. (2024, Januari). North Korea Ends Inter-Korean Military Agreement. Retrieved from Arms Control Association: <https://www.armscontrol.org/act/2024-01/news/north-korea-ends-inter-korean-military-agreement>
- O'Dell, H. (2023, Februari 7). The US doesn't recognize Taiwan as a sovereign nation, so why is it arming the island? Retrieved from Bluemarbles: <https://globalaffairs.org/bluemarkle/us-doesnt-recognize-taiwan-sovereign-nation-so-why-it-arming-island>
- Reuters. (2024, January 1). China's Xi says 'reunification' with Taiwan is inevitable. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-calls-taiwan-president-frontrunner-destroyer-peace-2023-12-31/>
- Roy, D. (2024, Februari 26). Despite Post-Election Speculation, War Over Taiwan Is Not Imminent. Retrieved from Eastwestcenter: <https://www.eastwestcenter.org/news/east-west-wire/despite-post-election-speculation-war-over-taiwan-not-imminent>
- Roy, D. (2024, Februari 26). Despite Post-Election Speculation, War Over Taiwan Is Not Imminent. Retrieved from Eastwestcenter: <https://www.eastwestcenter.org/news/east-west-wire/despite-post-election-speculation-war-over-taiwan-not-imminent>
- Steve Holland, N. B. (2024, Januari 14). U.S. does not support Taiwan independence, Biden says. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/biden-us-does-not-support-taiwan-independence>
- VOA. (2024, Januari 16). North Korea Ends Policy of Reunification with South Korea. Retrieved from <https://www.voanews.com/a/north-korea-ends-policy-of-reunification-with-south-korea/7441790.html>